

JAMBI DALAM BERITA

PELANTIKAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I JAMBI



Bertempat di Gedung DPRD Tk. I Jambi pada tanggal 11 Desember 1989, Menteri Dalam Negeri Bapak Rudini melantik Bapak Drs. H. Abdurahman Sayoeti, menjadi Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jambi, yang sebelumnya beliau menjabat sebagai wakil Gubernur KDH Tk. I Jambi.

Gubernur yang lama H. Masjchun Sofwan SH telah mengakhiri masa jabatannya selama dua periode atau 10 tahun masa pengabdian.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Gubernur yang dilantik tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 278/M tahun 1989 tanggal 15 November 1989, dalam masa jabatan 1989-1994 dan juga sekaligus diberhentikan dengan hormat dari jabatan Wakil Gubernur KDH Tk. I Jambi.

Selanjutnya Menteri mengatakan pula pelantikan ini bukanlah hal yang sifatnya serimonial belaka, akan tetapi pelambang terdapatnya kesinambungan dalam tugas secara Akumulatif

dan dapat berhasil guna serta berdaya guna dalam pelaksanaan pembangunan terus menerus dikatakan pula dalam melaksanakan tugasnya nanti kebijaksanaan Pemerintah Daerah tidak boleh bertentangan dengan per-Undang-undangan yang berlaku dan kepada Instansi-instansi vertikal wajib melaporkan segala rencana dan kegiatan, memberikan keterangan yang memenuhi petunjuk umum yang diberikan kepada wilayah. Pada kesempatan yang sama menteri mengucapkan terima kasih kepada H. Masjchun Sofwan SH baik secara pribadi maupun atas nama Pemerintah atas dedikasi dan pengabdianya selama memimpin wilayah Propinsi Jambi dalam masa dua periode jabatan telah mengantarkan masyarakat Jambi pada tingkat kesejahteraan yang dapat kita rasakan saat ini.

Lebih lanjut Menteri menyampaikan bahwa, Gubernur Kepala Daerah merupakan figur puncak di daerah, yang kebijaksanaan pimpinannya sangat mewarnai arah dan perkembangan kehidupan masyarakat di Daerah, oleh karena itu Gubernur Kepala Daerah menjadi tumpuan masyarakat yang menyatakan harapannya melalui proses pencalonan pemilihan oleh para Wakil Rakyat di DPRD, dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan fungsi sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di Daerah.

..... *Bersambung ke hal. 21*

- 3. Tepung tapioka 0,5 kg
- 4. Bleng 500 gram
- 5. Bawang putih 30 biji/siung
- 6. Garam dapur 200 gram
- 7. Air 9 liter

Cara membuatnya :

Kedelai yang telah dicuci bersih segera direbus sampai masak, kemudian didinginkan. Setelah dingin, kedelai dikukus, dicuci kembali dan diiriskan, sementara itu beras dicuci lalu dikukus sampai matang.

Bumbu seperti bawang putih dan garam ditumbuk sampai halus, dicampur ke dalam nasi hasil kukusan, kemudian semuanya ditumbuk dengan menggunakan alu sampai halus. Kerja selanjutnya adalah melarutkan bleng dalam 7

selanjutnya adalah melarutkan bleng dalam 7 liter air panas, dan melarutkan tepung tapioka dalam 1 liter air dingin. Dan bahan tersebut kemudian dicampur dan kita masukkan sampai mendidih. Sekarang seluruh bahan dicampur menjadi satu. Nasi berbumbu yang sudah dihaluskan, larutan bleng dan tepung tapioka, serta kedelai matang diaduk dan ditumbuk sekedarnya sampai berbentuk adonan. Adonan ini kita cetak pada loyang atau bumbu yang telah dibelah dua, dikukus lalu didinginkan. Adonan yang baru dikeluarkan dari cetakan jika sudah dingin betul, bahan ini didiamkan beberapa lama sampai permukaannya agak keras. Proses terakhir adalah mengirisnya tipis-tipis, lalu menjemurnya sampai kering (Silahkan anda mencoba).

LAPEK SAGAN

- B a h a n :
- ½ liter ketan
 - 5 buah pisang kepok yang matang sekali
 - ½ butir kelapa setengah tua
 - 1/3 gelas gula pasir
 - garam
 - daun pisang.

Cara membuatnya :

- Ketan dicuci, rendam semalam, tiriskan.
- Kelapa diparut memanjang.
- Campur jadi satu : Ketan, pisang, kepala, gula dan garam.
- Remas-remas sampai pisang benar-benar lumat dan adonan tercampur rata.

- Ambil 2 sendok makan, bungkus dengan daun pisang, kukus sampai ketannya masak.

Sambungan dari halaman 10

Pada akhirnya Menteri mengharapkan agar Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat membina aparatur sehingga memiliki kapabilitas yang tangguh, oleh karena itu perlu adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas kepegawaian serta melalui pengendalian dan pengawasan yang benar-benar efisien, demikian Menteri Dalam Negeri.